
BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) MELALUI NEW INTERNATIONAL LAND-SEA TRADE CORRIDOR (ILSTC) SEBAGAI IMPLEMENTASI FILSAFAT KONFUSIANISME

Oleh

Tiffany Xierry Amanda Anggono¹, Triesanto Romulo Simanjuntak², Novriest Uumbu W Nau³

^{1,2,3}Program Studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Email: 1372021085@student.uksw.edu

Article History:

Received: 23-04-2025

Revised: 06-05-2025

Accepted: 26-05-2025

Keywords:

Confucianism, Hegemony, China, ILSTC, BRI, Foreign Policy

Abstract: *The rise of China through the Belt and Road Initiative (BRI) is a complex phenomenon that presents opportunities for development while also raising geopolitical and security concerns on the international stage. Several countries perceive the BRI as a threat due to China's potential economic and political dominance, which could shift Western influence. This study employs a constructivist theoretical approach to offer an alternative perspective by examining the BRI through the ILSTC project as China's effort to achieve a form of hegemony distinct from traditional understandings. The concept of hegemony analyzed here is rooted in Confucian philosophy, which underpins the values and foreign policy of modern China. The findings indicate that China's hegemony, as reflected in the BRI and ILSTC, is neither aggressive nor threatening but is based on positive Confucian values such as harmony and virtue. In conclusion, China's hegemonic approach through the BRI represents a strategy that emphasizes cooperation and joint development, and thus should be understood within the context of China's culture and history*

PENDAHULUAN

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, angkatan darat terbesar di dunia, kelas menengah terbesar di dunia, kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, program luar angkasa berawak, persenjataan nuklir, dan sebagainya (Callahan, 2005). Meskipun semua dapat menyaksikan kebangkitan sejumlah negara berkembang, Tiongkok sejauh ini merupakan negara terpenting secara ekonomi. Tiongkok adalah pembawa dan penggerak dunia baru. Dengan perluasan kekuatannya yang cepat, Tiongkok memiliki hubungan yang semakin hegemoni dengan Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Afrika dalam waktu lebih dari satu dekade. Berbeda dengan negara-negara Asia Timur yang sebelumnya sukses secara ekonomi seperti Korea Selatan dan Taiwan yang sempat bergantung pada Amerika Serikat (AS), Tiongkok merupakan negara yang tidak pernah berada di bawah pengaruh AS.

Tiongkok berkembang sebagai kekuatan independen yang bahkan bersaing dengan AS (Jacques, 2009).

Di era kontemporer ini, semua dapat melihat kebangkitan Tiongkok yang memiliki ambisi untuk menggeser bahkan mengambil alih posisi hegemoni AS sebagai negara adidaya (Hikmawan, 2023). Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia atau “Great Powers” dengan ambisi untuk mencapai hegemoni. Saat ini, kawasan Asia Tenggara wilayah dekat Tiongkok untuk menjadi awal dari dimulainya ekspansi Tiongkok secara global. Tiongkok menyebarkan pengaruhnya melalui pendekatan multidimensi, yakni aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dalam setiap aspek tersebut, Tiongkok memiliki strategi yang jelas dan terukur untuk melaksanakannya demi meraih hegemoni di Asia Tenggara. Kebangkitan China sebagai kekuatan adidaya tidak terjadi secara instan, melainkan hasil dari upaya masif dan konsisten yang dilaksanakan dengan presisi (Alfi, 2023).

Akan tetapi, banyak narasi juga yang menyatakan bahwa kebangkitan Tiongkok ini dianggap sebagai sebuah ancaman (*China Threat*), khususnya dari sudut pandang Barat dan Realis. Penyebab lainnya meliputi penurunan relatif pengaruh dan otoritas AS di Asia, meluasnya pengaruh normatif Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan pertumbuhan lembaga multilateral regional, meningkatnya saling ketergantungan teknologi dan ekonomi di seluruh kawasan, dan perbaikan beberapa hubungan bilateral yang sebelumnya saling bertentangan. Sikap regional baru Tiongkok yang proaktif tercermin dalam hampir semua bidang kebijakan ekonomi, diplomatik, dan militer dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivisme Tiongkok di panggung global. Perspektif regional ini sangat kuat, mengingat beberapa tahun yang lalu, banyak negara tetangga Tiongkok menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar tentang kemungkinan Tiongkok menjadi hegemon regional yang mendominasi dan ancaman militer yang kuat.

Namun, di sisi lain, penulis ingin meyakini bahwa hegemoni Tiongkok yang dimaksud bukanlah sifat hegemoni seperti Barat yang cenderung militeristik dan memaksakan nilai-nilai budayanya ke negara lain. Sifat hegemoni Tiongkok bukanlah sebuah ancaman. Sifat hegemoni Tiongkok ini adalah layaknya seorang pemimpin yang berbudi luhur dan berkemanusiaan yang ingin bersama-sama membantu negara lain untuk bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Berbeda dengan hegemoni yang Barat pahami, hegemoni Tiongkok adalah non-militeristik dan hanya ingin menjadi pemimpin dalam suatu wilayah dengan keadilan, keadilan, dan kemanusiaan.

Penulis yakin bahwa sifat hegemoni yang dimaksud ini berasal dari salah satu filsafat kuno Tiongkok, yakni Konfusianisme. Di balik pengaruh ekonomi dan politiknya yang masif, Tiongkok juga dibentuk oleh tradisi filosofis yang telah mengakar selama ribuan tahun. Konfusianisme menempati posisi sentral dalam pemikiran tradisional Tiongkok karena menjadi fondasi filosofis pertama yang membentuk identitas dan konsep kenegaraan Tiongkok (Rosyidin, 2017). Identitas yang kuat tentang diri Tiongkok ini baru muncul akibat ajaran dari seorang filsuf bernama Konfusius (Kong Fuzi) pada abad ke 5-SM. Hingga saat ini, Konfusianisme menjadi aliran pemikiran terpenting yang masih terlihat dalam kebijakan dan cara hidup Tiongkok modern (Din, 2024).

Mohamad Rosyidin melalui salah satu jurnalnya yang berjudul “*The Dao of foreign policy: Understanding China’s dual strategy in the South China Sea*” menyatakan bahwa

budaya mempengaruhi perilaku negara (Rosyidin, 2019). Hal ini mengartikan bahwa bagaimana suatu negara bertindak, seperti kebijakan luar negeri, tidak terlepas dari kebiasaan, nilai, dan norma suatu bangsa. Budaya memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana suatu negara bertindak dan mengambil keputusan. Bahkan negara seringkali menggunakan ini untuk mempertahankan identitas, dominasi, dan pengaruhnya di dunia internasional. Selain itu, dengan menggunakan nilai-nilai budaya dalam kebijakan luar negeri, sebuah negara dapat membangun dan memperoleh dukungan dari rakyatnya (Klein, 1988). Maka, untuk mengeksplorasi makna kekuatan yang baru muncul ini, melalui penelitian ini, penulis menganggap bahwa kemandirian dan sifat hegemoni Tiongkok di bidang ekonomi ini berpegang pada norma dan aliran pemikiran kuno Tiongkok.

Pemikiran dan ajaran moral filsafat Konfusianisme ini turut membangun identitas Tiongkok. Pemerintahannya pun dilandaskan oleh prinsip-prinsip tersebut. Penekanannya pada kebajikan moral, pentingnya pemerintahan dalam urusan manusia, dan harmoni, telah menjadi nilai-nilai dasar peradaban Tiongkok sejak saat itu. Konfusianisme adalah aliran pemikiran sinkretis yang terinspirasi dari kepercayaan lain, khususnya Taoisme dan Buddhisme. Akan tetapi, ide-ide Konfusius sendiri tetap menjadi yang aliran pemikiran yang utama dan telah diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun (Mustofa, 2023). Bahkan tradisi Konfusianisme sendiri telah menjadi identitas Tiongkok terutama dalam hal politik karena berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat dan negara harus diatur (Rosyidin, 2017). Seorang sinolog terkemuka bernama Wang Gungwu melalui karyanya mengatakan bahwa warisan budaya Tiongkok akan tetap diingat dan tidak mudah luntur. Berikut ini kutipan pernyataan Wang (1991, 296–297).

"It is possible that a new proletarian worker-intellectual who open to modern world which is itself increasingly proletarian in its cultural values would systematically undermine the Chinese traditions of the past. ... I would venture to suggest that much of his Chinese heritage would remain with him for very long time to come."

Keyakinan Wang berlandaskan pada fakta bahwa tradisi dan kebudayaan Tiongkok telah bertahan dan berkembang selama ribuan tahun. Sengaja atau tidak, tradisi yang berbasis Konfusianisme masih tetap dipraktikkan secara turun-temurun sehingga, meskipun mungkin terjadi penurunan pengetahuan Konfusianisme di kalangan generasi muda Tiongkok, esensi pengetahuan itu diyakini pasti masih tertanam kuat dalam diri mereka.

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya, Konfusianisme ini merujuk pada suatu kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan dan moralitas untuk menciptakan maupun menjaga harmoni dalam masyarakat atau anggotanya (Muas, 2020). Konfusianisme mengajarkan hubungan sosial sebagai norma kesopanan yang menjadi dasar keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. "Ren" (仁) dan "Li" (礼) merupakan dua nilai terpenting yang ditekankan oleh filsafat ini. "Ren" (仁) memiliki arti kebaikan hati atau kasih kepada sesama. Sementara "Li" (礼) adalah tata krama atau etika yang mana memiliki makna untuk menjaga tatanan sosial yang memastikan bahwa setiap orang tahu tempatnya (Zhang, 2015).

Menurut pandangan Konfusianisme, kaisar Tiongkok dianggap sebagai agen 'kehendak langit' (天命, *Tianming*) (*Mandate of Heaven*), yang diberi kewajiban oleh langit untuk berperan seperti seorang raja/penguasa yang memerintah dengan bijaksana,

membawa kesejahteraan bagi manusia, dan menjaga harmoni. Namun, apabila raja tersebut tidak melaksanakan pemerintahannya dengan bijaksana, maka rakyatnya berhak untuk menggulingkan raja/penguasa tersebut. Tugasnya termasuk bertindak sebagai patriarki yang baik hati yang peduli terhadap tetangga yang secara budaya lebih rendah dari peradaban Tiongkok yang lebih tinggi. Ide ini kemudian sangat mempengaruhi pemerintahan Tiongkok hingga saat ini yang mana sifatnya melekat pada ide superioritas dan hierarkisnya (Din, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa Konfusianisme juga memvalidasi adanya kekuasaan dan wewenangnya, khususnya dalam konteks struktur hierarkis yang menegaskan perbedaan tegas antara pihak yang lebih tinggi (superior) dan pihak yang lebih rendah (inferior) (Burks, 1988). Pandangan ini percaya bahwa hierarki merupakan ciri ideal dalam tatanan internasional. Namun, Konfusianisme juga menekankan bahwa semua penguasa harus bertindak berdasarkan kebajikan (*De*) dan keadilan (*Yi*) sehingga tetap dicintai dan dipatuhi rakyatnya (Zhang, 2015). Dengan kata lain, filsafat ini melihat pentingnya kekuasaan berlandaskan kebajikan dan moralitas.

Jelas bahwa nilai-nilai filsafat yang telah disebutkan tersebut merujuk pada konsep hegemoni. Namun, perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan hegemoni Barat, hegemoni menurut Konfusianisme tidak berarti bahwa suatu pemimpin harus mempromosikan nilai-nilai budayanya ke entitas lain. Salah satu contoh praktek kebijakan Tiongkok yang mencerminkan nilai Konfusianisme adalah Tembok Besar Tiongkok (*Great Wall of China*). Tembok Besar Tiongkok mulanya dibangun untuk melindungi kedaulatan tanah Tiongkok dari kaum barbar (non-Tiongkok). Hal ini sejalan dengan pemikiran Konfusianisme yang mana menyiratkan sifat yang defensif dan non-ekspansionis (Rosyidin, 2017). Menurut filsafat ini, dalam menjalankan politik luar negeri harus berdasarkan prinsip "*De*" (kebajikan). Dengan demikian, bila menggunakan kekuatan militer untuk tujuan ekspansi atau penaklukan dianggap tidaklah bijaksana dan melemahkan legitimasi sebagai sosok pemimpin (Rosyidin, 2017).

Nilai-nilai Konfusianisme yang masih tertanam kuat dalam budaya Tiongkok tidak hanya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi, tetapi juga berdampak pada kebijakan politik luar negeri negara tersebut, termasuk dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan. Merujuk pada salah satu jurnal oleh Mohamad Rosyidin yang berjudul "Mengapa tidak berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan", mengenai strategi defensif Tiongkok di sengketa Laut Cina Selatan. Dikatakan bahwa Tiongkok masih menghindari penggunaan kekuatan militer dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalur damai/diplomasi. Maka dari itu, melalui penulisannya, diasumsikan bahwa konflik Laut Cina Selatan tidak menimbulkan peperangan. Hal ini dikarenakan norma keamanan nasional Cina yang menganut prinsip *cooperative security* (*hezuo anquan*) yang berakar dari tradisi filsafat Konfusianisme (Rosyidin, 2012).

Selain itu, dalam menjalankan pemerintahan domestiknya, sistem hierarki, resiprositas antara pemimpin dan rakyat juga, ketaatan, serta kepemimpinan politik masih kuat melekat di dalam diri Tiongkok sebagai warisan dari Konfusianisme. Bersama dengan Komunisme, Konfusianisme yang menganggap bahwa kedudukan tertinggi berada ditangan pemimpin membentuk sistem politik Tiongkok menjadi terpusat kepada satu pemimpin dan otokratik layaknya pada masa Kerajaan Tiongkok Klasik. Pemimpin memiliki kekuasaan

mutlak atas rakyat dan negaranya dengan tetap memiliki moralitas dan kebajikan yang tinggi (Rizky, 2021). Dengan demikian, dapat dianggap bahwa Konfusianisme masih dapat terlihat dalam praktek kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Tiongkok hingga abad yang ke 21 ini.

Sejalan dengan studi kasus yang penulis hendak angkat. *One Belt One Road* (OBOR) atau yang sekarang dikenal sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang penulis yakini sebagai salah satu implementasi nilai Konfusianisme yang masih melekat pada diri Tiongkok. BRI menyerukan model kerja sama dan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya internasional yang terbuka dan inklusif di bawah prinsip-prinsip panduan koeksistensi damai negara-negara berdaulat, yang dicapai melalui berbagai jenis peningkatan konektivitas dan dibiayai oleh instrumen keuangan multilateral baru. Proyek raksasa ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk kembali hubungan internasional dan pembangunan ekonomi global (Michael, 2019). BRI mempererat hubungan kerjasama dan membantu dalam pembangunan infrastruktur berbagai wilayah Asia, Eropa, Afrika dan laut yang berdekatan, khususnya negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah. BRI hadir untuk memberikan platform baru untuk kerja sama internasional yang akan bersama-sama mengatasi tantangan global dan komitmen terhadap 'perdagangan bebas dan inklusif' yang akan mengarah pada globalisasi inklusif (Liu, 2021).

Mengingat bahwa secara historis Tiongkok memandang dirinya sebagai pusat peradaban dan kekaisaran yang diutus langit, upaya Tiongkok untuk mengembalikan statusnya sebagai entitas yang hegemon saat ini tercermin dalam kebijakan luar negerinya, BRI. Penulis meyakini bahwa BRI bukanlah sekedar proyek ekonomi, namun juga sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai tradisional Tiongkok, Konfusianisme, tentang tatanan dunia yang harmonis, kepemimpinan moral, dan tanggung jawab sosial. Maka sesuai dengan prinsip dasar kebijakannya, Tiongkok mencari cara yang tidak mengutamakan kekerasan dan peperangan. Tiongkok menjunjung tinggi cara-cara yang lembut dan persuasif, salah satunya melalui BRI ini.

Salah satu bukti nyata hasil dari program BRI yang dapat terlihat adalah *New International Land-Sea Trade Corridor* (ILSTC) yang diluncurkan pada tahun 2015. ILSTC adalah hasil dari proyek BRI dengan Singapura sebagai mitra kunci sebagai koridor perdagangan yang menghubungkan Tiongkok Barat, Chongqing, dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Hadirnya ILSTC dapat membantu para pengirim barang dapat mengakses logistik utama di Singapura dan wilayah ASEAN melalui pelabuhan Teluk Guangxi Beibu yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Tiongkok (Zhao, 2023). ILSTC hadir untuk menciptakan rute terpendek dan terefisien dari pada rute yang lainnya (Zhao, 2023).

Secara geografis, jaringan transportasi peti kemas/kontainer intermodal dalam perdagangan internasional antara Tiongkok dan Singapura/kawasan ASEAN dapat digambarkan sebagai jaringan dengan bentuk barbel. Dalam hal ini, ILSTC adalah palang barbel, sedangkan Chongqing dan Singapura adalah dua titik ujungnya. Tidak hanya Chongqing, provinsi sekitarnya seperti Sichuan, daerah otonomi Guangxi, provinsi Guizhou, dan provinsi Yunnan akan berkontribusi pada pengembangan ILSTC, dan juga akan menjadi provinsi penerima manfaat utama dari ILSTC. Sementara di sisi lain, Singapura merupakan pusat *transshipment* untuk kawasan ASEAN dan Oseania, yang terhubung ke Filipina,

Indonesia, India, Australia, Selandia Baru, dll. ILSTC memberikan dampak besar pada pengembangan transportasi, perdagangan, dan ekonomi baik di wilayah Tiongkok Barat itu sendiri maupun kawasan ASEAN. Tiongkok bermaksud untuk mengintegrasikan pengembangan ILSTC dengan ekonomi regional. Perluasan fasilitas dan layanan logistik di wilayah Tiongkok Barat melalui proyek ini menunjukkan dampak positif awal pada ekonomi dan kerjasama BRI (Zhao, 2023).

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan konsep hegemoni menurut pandangan filsafat Konfusianisme dalam meneliti studi kasus BRI melalui ILSTC. Penulis meyakini bahwa upaya hegemoni non-militer Tiongkok ini sebagian besar dipengaruhi oleh filsafat Konfusianisme yang merupakan salah satu budaya strategis Tiongkok yang paling mendominasi hingga saat ini. Melihat bahwa filsafat Konfusianisme memvalidasi sentralitas dan hierarkis, dengan demikian, adanya BRI melalui ILSTC ini tidak hanya sekedar untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga maksud Tiongkok untuk mengembalikan statusnya sebagai sebuah hegemon global di abad ke dua puluh satu ini yang mana dipengaruhi oleh filosofi kuno Konfusianisme. Hal tersebut DIPERCAYA berkaitan dengan sejarah Tiongkok pra-modern (Geraldo, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini, penulis berupaya menafsirkan studi kasus BRI melalui ILSTC dengan menggunakan perspektif Konstruktivisme. Teori Konstruktivis cocok digunakan dalam meneliti studi kasus ini karena memiliki unsur nilai-nilai budaya, sejarah, identitas, sebagai alat analisis. Unsur-unsur tersebut tidak ditemukan dalam perspektif Liberal maupun Realis yang hanya menekankan faktor material seperti kekuatan ekonomi dan militer. Sesuai dengan salah satu tokoh konstruktivis terkemuka, Alexander Wendt, yang menyatakan bahwa struktur hubungan antarmanusia dibentuk oleh ide yang diyakini bersama, bukan sekedar kekuatan material yang ditemukan dalam pandangan Liberal maupun Realis (Wendt, 1999). Penulisan ini ingin menyatakan bahwa proyek BRI melalui ILSTC ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi, melainkan juga untuk kepentingan hegemon non-militeristik sesuai dengan pandangan filsafat Konfusianisme. Menurut penulis, BRI melalui ILSTC ini merupakan salah satu bukti nyata dari pernyataan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok sebagian besar dipengaruhi dan implementasi dari filsafat kuno Konfusianisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif Konstruktivisme, materi tidak diabaikan, tetapi bukanlah faktor utama yang menentukan perilaku negara. Sedangkan bagi Konstruktivis, ide dan pemahaman bersama adalah aspek terpenting di balik suatu materi. Konstruktivisme menekankan bahwa makna materi ditentukan oleh ide, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, tanpa ide, tidak ada kondisi material yang berarti (Rosyidin, 2017). Melalui pandangan Konstruktivis, dapat menjelaskan bagaimana para pembuat kebijakan menafsirkan realitas dan memilih kebijakan (Rosyidin, 2019).

BRI merupakan aspek materi dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, berupa proyek infrastruktur dan investasi ekonomi. Sementara itu, Konfusianisme Tiongkok mewakili aspek non-materi, yaitu nilai-nilai, norma, dan ideologi yang mendasari tindakan negara

tersebut. Namun, meskipun proyek BRI melalui ILSTC dan Konfusianisme ini merupakan dua aspek yang berbeda (aspek material dan ide), dalam pandangan Konstruktivisme, ide merupakan penggerak utamanya. Konstruktivisme percaya bahwa faktor-faktor ideasional atau normatif seperti budaya, norma, kepercayaan, bahasa, gagasan dan faktor non-materil lainnya merupakan hal yang penting dalam pembentukan struktur sosial (Burchill, 2005, hal. 196).

Pembentukan kebijakan luar negeri dalam pandangan Konstruktivisme disimpulkan dalam salah satu jurnal milik Rachmat Hidayatullah, Mohamad Rosyidin, Marten Hanura yang berjudul "Pengaruh Filsafat Konfusianisme dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Denuklirisasi Korea Utara". Dalam jurnal tersebut, para penulis menggunakan teori Konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jepperson, Wendt, dan Katzenstein, 1996. Dikatakan bahwa terdapat lima pola hubungan di antara norma, identitas, kepentingan dan kebijakan (tindakan suatu negara). Yang pertama, suatu struktur normatif atau norma akan membentuk kepentingan ataupun langsung membentuk suatu kebijakan. Yang kedua, norma akan membentuk suatu identitas aktor. Yang ketiga, identitas akan membentuk kepentingan lalu akan mempengaruhi kebijakan atau identitas secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan. Yang keempat, suatu identitas akan membentuk norma. Lalu yang terakhir, norma dan kebijakan memiliki hubungan yang saling berkaitan (Hidayatullah, dkk, 2022).

Dalam sudut pandang Konstruktivisme, Konfusianisme ini merupakan sebuah norma negara Tiongkok yang membentuk suatu kebijakan, dalam kasus ini adalah ILSTC. Pada dasarnya, Konfusianisme merupakan doktrin mengenai kepemimpinan dengan etika dan moralitas kemanusiaan demi mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis (Muas, 2020). Selain itu, nilai Konfusianisme juga mengembangkan makna *Tianxia* dan oleh karenanya Konfusianisme memvalidasi adanya hierarki. Dengan kata lain, pandangan tentang tatanan dunia yang harmonis dan inklusif, di mana seluruh dunia (atau "alam semesta" yang dikenal) dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan bermoral. Melalui penulisan ini, penulis meyakini bahwa norma tersebut terimplementasikan ke dalam salah satu tindakan Tiongkok, yakni dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri BRI melalui ILSTC.

Melihat bahwa filsafat Konfusianisme memvalidasi sentralitas dan hierarkis, dengan demikian, adanya BRI melalui ILSTC ini tidak hanya sekedar untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga maksud Tiongkok untuk mengembalikan statusnya sebagai sebuah hegemon global di abad ke dua puluh satu ini yang mana dipengaruhi oleh filosofi kuno Konfusianisme. Melihat bahwa BRI merupakan proyek yang diinisiasikan oleh Tiongkok, maka Tiongkok tidak hanya memperluas jejaring strategisnya tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama yang membentuk masa depan kawasan. Sebagai negara yang terkuat secara ekonomi dan militer di Asia, Tiongkok berambisi untuk memposisikan diri sebagai pemimpin regional melalui BRI. Karakter hegemoni Tiongkok ini dapat terlihat dari upayanya dalam membangun jaringan kerja sama, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan hubungan komplementer melalui BRI antara Tiongkok dengan ASEAN melalui berbagai pembangunan infrastruktur BRI. Hal ini sejalan dengan nilai Konfusianisme yang melihat bahwa Tiongkok memainkan peran sebagai pemimpin yang berbudi luhur dan menganut prinsip kebajikan (*de*).

Sementara terkait ILSTC, Tiongkok pula yang pertama kali menginisiasikan proyek ILSTC ini dengan Singapura (Wardhana, 2020). Dengan menginisiasikan pembangunan infrastruktur dan jalur perdagangan, Tiongkok memperkuat narasi mengenai “Tiongkok sebagai penyedia pembangunan” di Asia Tenggara. Hal ini dapat dianggap sesuai dengan mentalitas Tiongkok yang menganggap dirinya adalah pemimpin alami di kawasan tersebut, bukan hanya mitra yang setara.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhao Qing dan Wang Tao, setelah pembangunan ILSTC, dibandingkan dengan data perdagangan tahun 2016, volume perdagangan antara Tiongkok dan sepuluh negara ASEAN menunjukkan pertumbuhan positif, dan tingkat pertumbuhannya relatif besar. Dari analisis mereka sebelumnya, selain Tiongkok, beberapa negara Asia Tenggara menempati posisi penting dalam *Belt and Road* jaringan perdagangan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan status negara-negara Asia Tenggara dalam jaringan perdagangan *Belt and Road* telah diuntungkan sampai batas tertentu sejak pembangunan ILSTC. ILSTC itulah yang telah mengintensifkan perdagangan antara Tiongkok barat dan Asia Tenggara (Qing, 2023). Hal ini sejalan dengan nilai Konfusianisme yang melihat bahwa Tiongkok memainkan peran sebagai pemimpin yang berbudi luhur dan menganut prinsip kebajikan (*de*).

Negara-negara dengan ekonomi kecil di Asia Tenggara pun tertarik dengan proyek BRI ini karena dapat membantu menjembatani kesenjangan pembangunan di dalam dan lintas batas negara. Selain itu, negara-negara tersebut juga membutuhkan modal dan pengetahuan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan peluang ekonominya. Melihat permintaan tersebut, Tiongkok berupaya untuk menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan kekuasaannya dengan mendominasi di bidang ekonomi di Asia Tenggara melalui BRI. Hal ini sejalan dengan salah satu bunyi dari filsafat Konfusianisme yang mengatakan, “biarkan seorang penguasa mendasarkan pemerintahannya pada berbudi luhur prinsip dan dia akan seperti bintang kutub, teman sekamarnya tetap teguh di tempatnya, sementara semua bintang menghadap ke arahnya” (Hidayatullah, 2022).

Singapura merupakan salah satu negara maju dan memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. Selain itu, Singapura juga merupakan koordinator ASEAN dalam komunikasi dengan Tiongkok. Dengan demikian, ILSTC menjadi salah satu proyek unggulan Tiongkok dalam kerjasama BRI (Wardhana, 2020). Melalui ILSTC, Tiongkok dapat dikatakan menggunakan Singapura sebagai salah satu upayanya dalam menjalin hubungan dan meningkatkan pengaruhnya di negara-negara Asia Tenggara. Melihat hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Tiongkok memilih untuk memanfaatkan kerjasamanya dengan Singapura sebagai salah satu strateginya dalam mencapai hegemoni di kawasan Asia Tenggara.

Terkait hierarki, hal ini juga dipengaruhi oleh tradisi kuno Tiongkok, yakni sistem upeti. Di era kuno, Tiongkok memandang dirinya sebagai sebuah kekaisaran, sementara Tiongkok memandang negara-negara tetangganya sebagai inferior atau putra kaisar. Dalam studi kasus ILSTC, penulis berpendapat bahwa Tiongkok berperan sebagai sebuah kekaisaran. Sementara itu, Singapura dan negara-negara Asia Tenggara lainnya merupakan putra kaisar yang statusnya berada di bawah Tiongkok. Dengan strategi hierarki, Tiongkok ingin membangun hubungan hierarkis dengan Singapura dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mencapai tujuannya.

Perlu perhatikan juga bahwa jenis hegemoni Tiongkok adalah otoritas yang manusiawi (Zhang, 2015). Sekalipun Tiongkok melihat dirinya sebagai seorang pemimpin, dirinya bukanlah pemimpin yang otoriter dan bersifat memaksa. Dalam studi kasus yang diangkat, ILSTC ini merupakan proyek yang diinisiasikan oleh Tiongkok. Meskipun Singapura tidak mengekor ataupun melawan BRI, China cenderung berhati-hati dan menunjukkan adanya kebebasan memilih model kerja samanya dengan China dalam BRI (Kojima, 2021).

Konfusianisme selalu menekankan harmoni dalam keberagaman. Dalam hubungan internasional, tentunya filsafat tersebut dapat berarti hubungan internasional yang harmonis. Filosofi kuno Tiongkok terkait perdamaian dan keharmonisan ini dapat terlihat dari proyek ILSTC ini, yakni harmoni melalui konektivitas. Proyek ILSTC ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah integrasi ekonomi menuju stabilitas regional. Dalam menunjukkan kekuataannya, Tiongkok menggunakan upaya pembangunan infrastruktur (non-konfrontatif), bukan ekspansi kekerasan menggunakan kekuatan militer. Dengan dibangunnya berbagai infrastruktur, lapangan kerja di negara tersebut semakin meningkat. Hal ini kemudian juga berhubungan dengan salah satu nilai yang terkandung dalam filsafat Konfusianisme, yaitu kemanusiaan.

Akan tetapi, di sisi lain, aspek BRI telah banyak memiliki kritik dan pandangan negatif dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Banyak penelitian maupun narasi yang menyatakan bahwa Tiongkok memiliki motif lain dibalik adanya BRI. BRI juga banyak menuai kritik yang menyatakan bahwa tujuan Tiongkok melalui BRI adalah untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya, mengintegrasikan pasar internasional, dan membangun hubungan perdagangan dan infrastruktur strategis. Sementara itu, negara-negara yang menjalin kerjasama BRI, terlebih negara berkembang, cenderung memiliki risiko ketergantungan ekonomi yang asimetris melalui utang (Sandika, 2024). Semua hal ini dikarenakan program BRI ini telah menyebabkan beberapa negara yang terlibat terlilit hutang berlebihan (*debt trap*), mengancam kedaulatan negara, dan meningkatkan terjadinya tindakan korupsi (Kojima, 2021).

Namun, alih-alih dipandang sebagai ancaman, BRI melalui ILSTC justru menjadi sebuah proyek yang menjadi pilihan investasi bagi Singapura. Pada saat Singapura resmi terlibat dalam ILSTC, salah seorang pejabat senior Singapura, Chan Chun Sing tahun 2018, menyatakan komitmen Singapura untuk menginvestasikan SGD 27 miliar dalam proyek ILSTC. Hal ini tentu tidak menjadi potensi bagi Singapura untuk terlilit hutang dengan Tiongkok karena keterlibatan Singapura dalam BRI hanya berupa investasi, bukan pinjaman. Bahkan, Singapura sendiri telah berupaya memanfaatkan kerangka BRI sebaik-baiknya untuk membangun dirinya sebagai pusat keuangan dan transportasi di kawasan Asia Timur. Tidak seperti negara-negara berkembang Asia Tenggara lainnya, Singapura, yang memiliki hubungan komplementer dengan Tiongkok sebagai investor infrastruktur, tidak melihat adanya ancaman dari BRI. Singapura menyambut BRI dan mencoba memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal darinya. (Kojima, 2021).

Selain itu, dalam KTT ASEAN yang diadakan pada bulan November 2017, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menggarisbawahi bahwa BRI Tiongkok merupakan kesempatan baik untuk menjalin hubungan yang komplementer antara Tiongkok dan ASEAN. Melalui kerangka BRI, kolaborasi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN begitu

signifikan dalam mempererat hubungan dan tatanan regional yang harmonis di kawasan. Lee juga menambahkan bahwa Singapura sendiri bersedia menjadi broker yang menjembatani kerjasama Tiongkok dan negara ASEAN lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan sinergi kerjasama (Cheng, 2017; Ba, 2019). Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa BRI sebagai salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok ini mencerminkan filsafat Konfusianisme yang menekankan nilai harmonis.

Pada bulan Agustus 2018, Chan Chun Sing kembali bertemu dengan para mitranya di China kali ini dalam kegiatan *The Future China Global Forum and Singapore Regional Business Forum 2018*. Pada sambutannya di acara tersebut Sing kembali menegaskan komitmen Singapura dan perkembangan jalannya negosiasi CCI yang pada waktu itu telah berjalan empat bulan. Ia mengatakan bahwa:

"[The CCI's] emphasis is on building networks. The CCI-STC is a new key initiative under the CCI that connects the "Belt" and the "Road" and contribute to Western China and Southeast Asia's development by opening up a new sea line of communication between the two regions and by integrating the sea and the rail transport infrastructure."

Hal tersebut menandakan bahwa Singapura sendiri menyambut dengan hangat proyek ILSTC yang diusungkan oleh Tiongkok. Perdana Menteri Singapura sendiri menyatakan bahwa terdapat kesempatan yang baik untuk bekerja sama dan meningkatkan hubungan yang komplementer melalui *platform* BRI antara China dan ASEAN. Pada tahun 2017, Lee Hsien Loong memberikan pidato dalam sebuah undangan pertemuan. Dalam pidatonya, Lee mengungkapkan dukungannya terhadap proyek BRI Tiongkok. Lee menyatakan

"[BRI]... Integrates China into regional and international economic systems while greatly boosting the prosperity and development in other countries... succesful China, a prosperous and confident China, a China that coexists peacefully and benefits mutually with neighboring countries is not only good for the well being of China, but also the world at large" (Loong dalam Xinhua News, 2017).

Proyek ILSTC ini dinyatakan mendatangkan hasil yang baik. Yang awalnya pada tahun 2019, volume impor RMB 691,6 miliar meningkat menjadi RMB 881,7 miliar di tahun 2022. Menurut laporan dari Xinhua dan situs resmi pemerintah, indeks tersebut disusun oleh *Chongqing Port and Logistics Office*, serta Komisi Pembangunan dan Reformasi Wilayah Otonom Guangxi Zhuang bersama instansi terkait dari provinsi lain di Tiongkok Barat (Shimeng, 2023). Penyusunan indeks juga melibatkan *Coordination Center for Logistics and Operation, New International Land-Sea Trade Corridor and the New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd*, menurut Liu Wei (Direktur *Coordination Center for Logistics and Operation ILSTC*). Laporan indeks tersebut dinyatakan dalam sesi pembukaan *Western China International Fair for Investment and Trade* kelima. Bahkan berdasarkan data dari surat kabar resmi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, *People's Daily*, pada 2023, sebanyak 615.200 TEUs barang telah diangkut melalui koridor ini, naik 7% dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai total melebihi 64,32 miliar yuan (sekitar 8,9 miliar USD), meningkat 16% dari tahun sebelumnya (Shimeng, 2023).

Selain peningkatan volume perdagangan dan nilai ekspor impor, adanya ILSTC ini juga meningkatkan infrastruktur dan daya saing. Berdasarkan indeks pembangunan ILSTC pada 2022 tercatat sebesar 135,2 poin, meningkat 10,3% dari 2021 dan 32,5% dari 2020,

yang mana artinya menunjukkan efisiensi operasional dan kualitas pembangunan infrastruktur yang semakin optimal. Subindeks daya saing meningkat 14,8 poin menjadi 125,6 poin berkat peningkatan infrastruktur dan metode logistik baru. Di samping itu, hadirnya ILSTCA juga mengurangi biaya logistik dan pajak. Inisiatif bea cukai di China telah mengurangi biaya logistik hingga 60% untuk perusahaan yang menggunakan koridor ini, dengan penghematan biaya sebesar 22,37 juta yuan dan pengurangan pajak 3,01 juta yuan pada 2024 (Zheng, 2024). Dengan demikian, ILSTC telah terbukti membawa dampak positif nyata bagi negara-negara yang terlibat, terutama dalam hal peningkatan efisiensi logistik, pertumbuhan perdagangan, pengembangan industri, pengurangan biaya, dan penguatan integrasi ekonomi regional. Data kuantitatif seperti peningkatan volume perdagangan, nilai ekspor-impor, dan indeks pembangunan koridor mendukung klaim tersebut secara empiris.

Selain BRI, beberapa sikap yang diambil Tiongkok dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan juga mencerminkan nilai-nilai positif dari Konfusianisme. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan isu terkait, Tiongkok menggunakan jalur yang kooperatif melalui dialog antar negara. Meskipun Tiongkok juga hadirkan kekuatan-kekuatan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan, militer tersebut dibangun hanya untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Dengan kata lain, kekuatan militer yang dibangun untuk tujuan defensif semata, bukan untuk tujuan invasi atau penaklukan (Rosyidin, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BRI bukanlah kebijakan luar negeri Tiongkok yang memiliki motivasi buruk di belakangnya. ILSTC sebagai salah satu hasil proyek BRI mencerminkan komitmen Tiongkok dalam membangun kerja sama global, menawarkan alternatif perspektif atas narasi Barat yang kerap memandang kebangkitan Tiongkok sebagai tantangan bagi tatanan internasional. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Konfusianisme masih dapat terlihat dalam salah satu program BRI Tiongkok, yakni ILSTC. Sedangkan, beberapa pemikiran tradisional Tiongkok seperti Konfusianisme ini cenderung menekankan pada harmoni dan keteraturan (Dellios, 2011).

Nilai-nilai dan budaya nasional memainkan peran penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit dengan peradaban panjang seperti Tiongkok dan India akan memainkan peran yang semakin penting dalam pemerintahan internasional. Oleh karenanya, perlu dipahami bagaimana nilai-nilai tradisional memberikan pengaruh terhadap perspektif dan pendekatan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari identitas nasional, norma sosial, dan budaya yang membentuk karakter serta tujuan kebijakan tersebut.

Seorang diplomat AS, Henry Kissinger, melalui bukunya yang berjudul *On China*, berpendapat bahwa ideologi politik yang dianut Tiongkok tidak bersifat agresif (Kissinger, 2011). Pada bulan Desember 2003, Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao, pun menyatakan bahwa Tiongkok berbeda dengan Eropa-Amerika yang cenderung bangkit menggunakan kekaisaran yang keras. Kemajuan ilmiah dan teknologi Tiongkok ada untuk memecahkan berbagai permasalahan sumber daya dan lingkungan. Di sinilah letak tekanan bahwa kebangkitan Tiongkok adalah sebuah kebangkitan yang damai (Callahan, 2005).

Menurut William A. Callahan, kebangkitan Tiongkok yang damai adalah formula yang merangkum hakikat kebijakan dalam negeri dan hubungan luar negeri dalam reformasi Tiongkok (Callahan, 2005). Jaques juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip perdamaian dan keharmonisan dunia (Jacques,

2009). Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan ini, Tiongkok selalu menghindari metode yang mendukung penggunaan kekerasan dan perang (Anggraini, 2023). Adapun kekuatan militer Tiongkok digunakan hanya untuk pertahanan diri semata (Callahan, 2005). Tiongkok menjunjung tinggi cara-cara yang lembut dan persuasif (Linda, 2010). Menurut penulis, seluruh hal ini pun dipengaruhi oleh filsafat Konfusianisme Tiongkok.

KESIMPULAN

Filsafat Konfusianisme merupakan salah satu aliran pemikiran kuno Tiongkok terpenting yang masih terlihat dalam kebijakan dan cara hidup Tiongkok modern saat ini (Din, 2024). Aliran Konfusianisme sendiri dianggap sangat penting karena merupakan pandangan yang menjadi fondasi utama budaya, politik, dan sosial Tiongkok hingga saat ini (Asyhari, 2011). Perlu diingat bahwa keputusan kebijakan oleh negara tidak terlepas dari adanya faktor historis suatu negara. Budaya mempengaruhi perilaku negara (Rosyidin, 2019). Hal ini mengartikan bahwa bagaimana suatu negara bertindak, seperti kebijakan luar negeri, tidak terlepas dari kebiasaan, nilai, dan norma suatu bangsa. Budaya memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana suatu negara bertindak dan mengambil keputusan. Maka dari itu, penerapan teori konstruktivisme cocok digunakan untuk membantu memahami kebijakan luar negeri Tiongkok, ILSTC, sebagai salah satu implementasi filsafat Konfusianisme.

Penulisan ini berhasil menjawab rumusan masalah: apa strategi Tiongkok sebagai perwujudan implementasi filsafat Konfusianisme. BRI melalui ILSTC merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang penulis yakini masih mencerminkan filsafat Konfusianisme. Salah satunya adalah terkait dengan sifat hegemoninya. Perlu diingat bahwa hegemoni yang dimaksud oleh Konfusianisme ini tidak seperti hegemoni Barat yang cenderung bersifat memaksa dan materialistik. Hegemoni menurut Konfusianisme ini memiliki makna seorang pemimpin yang berbudi luhur, memegang prinsip kebajikan dan moralitas, serta bertugas untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan masyarakatnya.

Sementara itu, BRI merupakan salah satu proyek yang dimodali oleh Tiongkok untuk membantu membangun infrastruktur negara-negara lain (Fauzziyah, 2024). Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan jangkauan global Tiongkok dengan negara-negara lain (CNBC, 2018). Melihat bahwa BRI merupakan proyek yang diinisiasikan oleh Tiongkok, maka Tiongkok tidak hanya memperluas jejaring strategisnya tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama yang membentuk masa depan kawasan. Melalui BRI dan ILSTC, Tiongkok berupaya mengembalikan peran historisnya sebagai negara hegemon di Asia

Terkait ILSTC, Tiongkok pula yang pertama kali menginisiasikan proyek ILSTC ini dengan Singapura (Wardhana, 2020). Dengan menginisiasikan pembangunan infrastruktur dan jalur perdagangan, Tiongkok memperkuat narasi mengenai “Tiongkok sebagai penyedia pembangunan” di Asia Tenggara. Hal ini dapat dianggap sesuai dengan mentalitas Tiongkok yang menganggap dirinya adalah pemimpin alami di kawasan tersebut, bukan hanya mitra yang setara. Di samping itu, melalui ILSTC, Tiongkok dapat dikatakan menggunakan Singapura sebagai salah satu upayanya dalam menjalin hubungan dan meningkatkan pengaruhnya di negara-negara Asia Tenggara. Melihat hal tersebut, penulis berpendapat

bahwa Tiongkok memilih untuk memanfaatkan kerjasamanya dengan Singapura sebagai salah satu strateginya dalam mencapai hegemoni di kawasan Asia Tenggara.

ILSTC merupakan sebuah proyek yang melibatkan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. ILSTC merupakan proyek yang diinisiasikan oleh Tiongkok. Sesuai dengan Konfusianisme, seorang pemimpin yang bermoral dan berkebijakan bertugas untuk menciptakan dan menjaga harmoni di tengah masyarakatnya. Sementara itu, harmoni didefinisikan sebagai mitra atau kerjasama global. Berangkat dari prinsip *Confucian improvement* yakni “*establish if let establish*” yang mana memiliki makna bahwa kepentingan diri hanya bisa dicapai jika kepentingan yang lain juga dapat tercapai secara simultan. Mencius, seorang murid dari Konfusius, menegaskan sebuah prinsip bahwa kepentingan individu hanya dapat tercapai optimal ketika di dalamnya terdapat harmoni antaranggota. Selain itu, Tiongkok memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk membantu pembangunan negara-negara Asia Tenggara, membangun jaringan kerja sama, dan meningkatkan hubungan komplementer, yang semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip Konfusianisme.

Saran

Walaupun BRI mendapat kritik terkait potensi jebakan utang dan dominasi ekonomi, khususnya dari negara-negara Barat, Singapura justru melihat BRI dan ILSTC sebagai peluang investasi dan memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan dan transportasi regional. Kolaborasi Tiongkok dan negara-negara ASEAN melalui BRI dinilai mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, sesuai dengan nilai-nilai Konfusianisme tentang harmoni dan kerja sama. Secara keseluruhan, implementasi BRI dan ILSTC menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan filosofi Konfusianisme sebagai landasan dalam membangun pengaruh regional melalui pendekatan non-militer, kerja sama ekonomi, dan integrasi kawasan, serta menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berbudi luhur di Asia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfi, R., Muawal, F. S., & Ismail, G. A. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 7(1), 1-15.
- [2] Anggraini, G., Arianto, A. R., & Saputro, P. B. (2023). China's Global Strategy for the 21st Century of Silk Road: China and the Asia Security Architecture in Xi Jinping Government. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(1), 82-131.
- [3] Asyhari-Afwan, B. (2011). Nasionalisme–Pragmatis: Pilihan Model Kapitalisme a la Cina. *Dewan Redaksi Clara Juwono*.
- [4] Burchill, S., et al. (2005) *Theories of International Relations*. 3rd Edition, Palgrave Macmillan, Houndmills
- [5] Burks, A. W., & Pye, L. W. (1988). Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. *The Journal of Asian Studies*, 47(4), 842. doi:10.2307/2057863
- [6] Callahan, William. (2005). *Forum: The Rise of China How to understand China: the dangers and opportunities of being a rising power*. *Review of International Studies* (2005), 31, 701–714 Copyright British International Studies Association

doi:10.1017/S0260210505006716

- [7] CALLAHAN, W. A. (2005). *How to understand China: the dangers and opportunities of being a rising power. Review of International Studies*, 31(04), 701. doi:10.1017/s0260210505006716
- [8] Cheng, C. (2017). "Anticipated support from children and later-life health in the United States and China." *Social Science & Medicine*, 179, 201-209
- [9] CNBC. (2018). Ancaman Dagang Trump Justru Bisa Buat China Makin Berpengaruh. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180629113228-4-21040/ancaman-dagang-trump-justru-bisa-buat-china-makin-berpengaruh>
- [10] Dellios, R. (2021). When Geopolitics Meets Development on the Belt and Road: A Confucian Journey. In C. M. Clark, & E. A. Clark Benavides (Eds.), *Political Economy: Theories, Principles, and Politics* (pp. 77-100). Nova Science Publishers.
- [11] Din, Jalalud. (2024). The impact of Confucianism on ancient Chinese society and governance. *Int J Foreign Trade Int Bus*;6(1):124-127. DOI: [10.33545/26633140.2024.v6.i1b.107](https://doi.org/10.33545/26633140.2024.v6.i1b.107)
- [12] Fauziyyah, M., Hidayat, T., & Panorama, A. D. (2024). The Cooperation Between Indonesia-China Through The Belt And Road Initiative (Bri) In Infrastructure Development In Indonesia In 2019-2023. *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2390>
- [13] Geraldo Schwengber, Jessica & Wieland, Josef & Niedenführ, Matthias. (2022). European Perspectives on the New Silk Roads.
- [14] Hidayatullah, R., Rosyidin, M., & Hanura, M. (2022). Pengaruh Filsafat Konfusianisme dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Denuklirisasi Korea Utara. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(2), 95-109. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i2.33417>
- [15] Hikmawan, E., Muhammad, F., & Sahide, A. (2023). Kebangkitan Tiongkok Dalam Membendung Hegemoni Amerika Serikat: Studi Kasus Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 549-559.
- [16] Hui Zhao, Nan Yu, Siying Zhu. (2023). International land-sea trade corridor for sustainable transportation: A review of recent literature, *Cleaner Logistics and Supply Chain*, Volume 6, 100089, ISSN 2772-3909, <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2022.100089>.
- [17] Jacques, Martin. (2009). *When China Rules the World*.
- [18] Klein, B. S. (1988). Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defence Politics. *Review of International Studies*, 14(2), 133-148. <http://www.jstor.org/stable/20097137>
- [19] Kissinger, Henry. (2011). *On China*. Penguin Press HC, The. Klein, B. S. (1988). Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defence Politics. *Review of International Studies*, 14(2), 133-148. <http://www.jstor.org/stable/20097137>
- [20] Kojima, K. (2021). Domestic politics and policy making toward China in East Asian countries. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(2), 230-245.

- <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1956040>
- [21] Linda. (2010). *Meningkatnya Power China di Indonesia melalui soft power (studi kasus: Chinese Bridge Competition)*. Tesis, Universitas Indonesia, Ilmu Hubungan Internasional.
- [22] Liu, W. (2021). Confucian geopolitics or Chinese geopolitics? *Dialogues in Human Geography*, 11(2), 265-269. <https://doi.org/10.1177/20438206211017774>
- [23] Michael A. Peters (2022) The Chinese Dream, Belt and Road Initiative and the future of education: A philosophical postscript, *Educational Philosophy and Theory*, 54:7, 857-862, DOI: 10.1080/00131857.2019.1696272 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1696272>
- [24] Muas, R. T. N. M. E. (2020). Konfusianisme Sebagai sabuk pengaman RRT. *Paradigma*, 10(2), 206-224.
- [25] Mustofa, Ali. (2023). Filsafat Keseharian.
- [26] Qing, Zhao. The Impact of the New Western Land-Sea Corridor on the Trade Relationship of China and Other Countries Under the Belt and Road Initiative. (2023). *Journal of Asian Geography*, 2(1), 44-55. <https://ejournal.usm.my/jag/article/view/3990>
- [27] Rizki, K., & Hariadi, M. C. (2021). Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Two Child Policy Presiden Xi-Jinping. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(2), 11-27.
- [28] Rosyidin, Mohamad. (2012). Mengapa tidak berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan. *Andalas Journal of International Studies*. 1. 137-151. 10.25077/ajis.1.2.137-151.2012.
- [29] Rosyidin, M. China's Strategic Culture and the Challenge of Security Management in the South China Sea Dispute. *East Asia* 34, 133-145 (2017). <https://doi.org/10.1007/s12140-017-9270-5>
- [30] Rosyidin, M. (2019). The *Dao* of foreign policy: Understanding China's dual strategy in the South China Sea. *Contemporary Security Policy*, 40(2), 214-238. <https://doi.org/10.1080/13523260.2019.1565374>
- [31] Shimeng, Li. (2023). *Coordination Center for Logistics and Operation launched to add strong momentum for dev't of land-sea trade corridor*. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/323477.html>
- [32] Wardhana, Agastya. (2020). *Respons Negara-Negara Asia Tenggara Terhadap Dominasi China*. Airlangga Publisher.
- [33] Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [34] Zhang, F. (2015). *Confucian Foreign Policy Traditions in Chinese History*. *The Chinese Journal of International Politics*, 8(2), 197-218. doi:10.1093/cjip/pov004
- [35] Zhang, F. (2015). *Chinese Hegemony: Grand Strategy and International Institutions in East Asian History* (1st ed.). Stanford University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsdphc>
- [36] Zheng, R. (2024). *15 Customs Initiatives to Streamline ILSTC Logistics, Slash Costs* <https://www.ichongqing.info/2024/11/18/15-customs-initiatives-to-streamline-ilstc-logistics-slash-costs/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN